



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Gajah Mada, Telepon (0541) 733333 Fax. (0541) 737762 - 742111  
SAMARINDA (75001)

Samarinda, 27 September 2021

Kepada

Nomor	: 700/3043 /Itprov/IX/2021	Yth.	Sekretaris Daerah Kabupaten/
Sifat	: Segera		Kota se Kalimantan Timur
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar		di -
Hal	: Penyampaian Kuesioner		Tempat
	Penilaian Keberhasilan Bidang		
	Pencegahan Korupsi Tahun 2021.		

Dalam rangka penilaian keberhasilan pembangunan Bidang Pencegahan Korupsi (PK) pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, maka bersama ini disampaikan kuesioner Penilaian Keberhasilan tersebut sebagaimana terlampir. Jawaban kuesioner beserta data pendukung kami harapkan disampaikan kepada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selambat-lambatnya hari Senin tanggal 18 Oktober 2021.

Tim Penilai akan melakukan validasi dan verifikasi data pendukung pada Minggu III bulan Oktober 2021. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Hery Nordi (HP. 08125592421), alamat e-mail [inspektorat.provkaltim@gmail.com](mailto:inspektorat.provkaltim@gmail.com)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,

MUHAMMAD SA'BANI

Pembina Utama

NIP. 19620128 198803 1 005

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
3. Inspektur Daerah Kab/Kota se Kalimantan Timur.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KUESIONER  
PENILAIAN PANJI – PANJI KEBERHASILAN BIDANG PECEGAHAN KORUPSI  
TAHUN 2021

**Petunjuk Pengisian dan Catatan Kuesioner:**

1. Jawablah pertanyaan dengan singkat, lengkap dan jelas.
2. Jika ruang yang diberikan untuk penjelasan tidak memadai, sisi belakang lembar kuesioner ini dapat digunakan untuk penjelasan atau mohon gunakan lembar kertas lain.
3. Jika terdapat dokumen pendukung yang dapat memperkuat dan memberikan gambaran secara lengkap dan jelas atas jawaban Bapak/Ibu, mohon dokumen tersebut disertakan.
4. Jika terdapat pertanyaan yang menurut Bapak/Ibu serupa, mohon untuk tetap diisi karena apapun jawaban yang diberikan akan sangat bermanfaat bagi kami.
5. Jawaban dapat kami terima paling lambat hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 ditujukan kepada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Samarinda.

**Data Responden**

Nama : .....

NIP : .....

Unit Kerja : .....

Jabatan : .....

Pemerintah Kab/Kota : .....

Mohon dijawab dengan memberikan tanda ✓ dan tambahkan penjelasan apabila diperlukan

No	Pertanyaan	Ya/Tidak
1	Apakah telah dilaksanakan penilaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ?	
	Jika sudah, berapa hasil skor IPK Tahun 2020.	
2	Apakah Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di PEMDA Kabupaten/Kota telah menuju Kapabilitas APIP sesuai dengan leveling yang diamanatkan dalam RPJMD Kab/Kota	
3	Berapa persen PNS wajib LHKPN yang sudah menyampaikan LHKPN 2020	
4	Berapa persen PNS yang sudah menyampaikan LHKASN 2020	
5	Opini BPK atas LKPD tahun 2019 dan LKPD Tahun 2020	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No		Pertanyaan	Ya/Tidak
6		Berapa persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang telah tuntas ditindaklanjuti sampai dengan semester 1 Tahun 2021	
7		<b>Apakah telah dilakukan Audit :</b>	
	a.	Audit Kepegawaian	
	b.	Audit Kepatuhan BMD	
	c.	Probity Audit	
8		Hasil Penilaian Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten/Kota Tahun 2020.	
9		Berapa Jumlah PNS/ASN yang dipidana terkait dengan Tindak Pidana Korupsi (TPK) periode 2020 s/d saat penilaian (September 2021)	
10	a.	Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota sudah membuat kode etik dan aturan perilaku PNS/ASN ?	
	b.	Apakah telah dilakukan evaluasi atas Kode Etik dan aturan perilaku PNS/ASN ?	
	c.	Jumlah hukuman disiplin PNS/ASN s/d saat penilaian (September 2021) ?	
11	a.	Apakah tersedia transparansi informasi lengkap tentang jenis, lama (waktu), biaya dan persyaratan perizinan pada DPMPTSP?	
	b.	Apakah Rekomendasi Teknis sudah difasilitasi oleh DPMPTSP	
	c.	Apakah Tersedia saluran/media pengaduan baik manual atau elektronik ?	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No		Pertanyaan	Ya/Tidak
12	a.	Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota sudah membuat regulasi tentang whistle blower system ( sistem perlindungan pelapor ) Tindak Pidana Korupsi ?	
	b.	Apakah regulasi tersebut telah diterapkan?	
13	a.	Apakah telah dibentuk Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) di Pemerintah Kabupaten/Kota?	
	b.	Berapa persen anggota Pokja UKPBJ telah bersertifikasi?	
	c.	Apakah APIP telah melakukan Evaluasi terhadap sistem UKPBJ?	
14	a.	Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota sudah membuat pedoman rencana aksi program Pemberantasan korupsi terintegrasi ?	
	b.	Berapa persen rencana aksi 2020 yang telah dilaksanakan?	
15	a.	Apakah telah dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat oleh Kepala Daerah ?	
	b.	Apakah ada Regulasi tentang pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat ?	
16	a.	Apakah Pemerintah Kab/Kota sudah memiliki Website ?	
17	a.	Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota sudah membentuk Tim Penilai Kerugian Daerah (TPKD) sesuai PP No. 38 Tahun 2016 ?	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No		Pertanyaan	Ya/Tidak
	b.	Berapa jumlah kerugian Negara/Daerah yang masuk ke Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah ?	
	c.	Berapa jumlah yang telah ditindaklanjuti/disetor ke Kas Daerah ?	
18	a.	Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu?	
	b.	Apakah sudah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) berkenaan dengan Layanan Informasi Publik ?	
	c.	Apakah website Pemerintah Kabupaten/Kota telah memuat Daftar Informasi Publik untuk dipublikasikan ?	
19	a.	Apakah Kabupaten/Kota telah membentuk Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) ?	
	b.	Berapa jumlah pengaduan mengenai pungutan liar yang ditindaklanjuti oleh Tim periode September Tahun 2021	
	c.	Apakah sudah dianggarkan kegiatan Tim Saberpungli dalam APBD Kabupaten/Kota Tahun 2021	
20	a.	Berapa SKPD yang telah ditetapkan dan diusulkan menjadi ZI WBK Tahun 2020?	
	b.	Berapa SKPD yang telah ditetapkan dan diusulkan menjadi ZI WBBM tahun 2020?	
	c.	Apakah sudah ada Penetapan dari Kementerian PAN dan RB terhadap SKPD yang ditetapkan dan diusulkan dimaksud ?	
21	a.	Berapa Prosentase Capaian MCP (Monitoring Centre for Prevention) dari Koordinasi & Supervisi Pencegahan KPK Tahun 2020	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No		Pertanyaan	Ya/Tidak
22	a.	Apakah Kabupaten/Kota telah melaksanakan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)	
23.	a.	Apakah <i>Self Assessment</i> Maturitas SPIP telah dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten/Kota ?	
24.	a.	Apakah Inspektorat Daerah Kab/Kota telah membuat Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko ?	
25.	a.	Apakah Inspektorat Daerah Kab/Kota telah Menyusun PKPT Berbasis Risiko ?	
26.	a.	Apakah Inspektorat Daerah Kab/Kota telah melakukan Audit Kinerja ?	
27	a.	Apakah telah dilakukan Pendampingan Penilaian Risiko oleh Inspektorat Daerah Kab/Kota kepada SKPD ?	

....., Oktober 2021

Sekretaris Daerah.....

Cap dan ttd

(.....)

NIP. ....